

MITIGASI BENCANA BANJIR BANDANG BAGI MASYARAKAT KECAMATAN TAROGONG KIDUL PASCA BANJIR BANDANG GARUT TAHUN 2016

Rizky Dwi Putra¹, Anak Agung Rai Wahyuni², Anak Agung Inten Asmariati³
Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available Juni, 2025

Email:

dwiputerizky42@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Mitigasi bencana sendiri merupakan bagian daripada siklus penanggulangan bencana yang meliputi kesiapan, penanggulangan, pemulihan dan pembangunan ulang. Mitigasi bencana di Kecamatan Tarogong Kidul adalah respon pasca banjir bandang Garut tahun 2016. Mitigasi bencana yang dilaksanakan memiliki implikasi yang terasa pada saat banjir bandang kembali melanda Kabupaten Garut tahun 2022 khususnya di Kecamatan Tarogong Kidul. Adapun yang menjadi pertanyaan penulis adalah 1) Mitigasi bencana banjir bandang di Kecamatan Tarogong Kidul? 2) Implikasi mitigasi bencana banjir bandang bagi masyarakat Kecamatan Tarogong Kidul? Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan studi pustaka. Metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan dan dipadukan dengan teori sejarah juga teori manajemen bencana digunakan untuk menjawab permasalahan. 1) Mitigasi bencana yang dilakukan di Kecamatan Tarogong Kidul terdiri dari berbagai sektor. 2) Implikasi mitigasi bencana banjir bandang di Tarogong Kidul dapat dirasakan karena program yang dilaksanakan bisa berjalan.

Kata Kunci : Banjir Bandang, Mitigasi, Implikasi

Abstract

Disaster mitigation itself is part of the disaster management cycle which includes preparedness, emergency response, recovery and rebuilding. Disaster mitigation in Tarogong Kidul District is a post-flash flood response in Garut in 2016. The disaster mitigation carried out has implications that are felt when flash floods hit Garut Regency again in 2022, especially in Tarogong Kidul District. The author's questions are 1) Flash flood disaster mitigation in Tarogong Kidul District? 2) Implications of flash flood disaster mitigation for the people of Tarogong Kidul District? The type of data used is qualitative using data collection techniques, namely observation, interviews and literature studies. The historical method consisting of four stages and combined with historical theory and disaster management theory is used to answer these problems. 1) Disaster mitigation carried out in Tarogong Kidul District consists of various sectors. 2) The implications of flash flood disaster mitigation in Tarogong Kidul can be felt because the programs implemented can run.

Keywords : Flash Floods, Mitigation, Implications

PENDAHULUAN

Kabupaten Garut termasuk daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Garut yang dipenuhi oleh pegunungan dan Sungai Cimanuk yang merupakan sungai terbesar di kawasan ini. Ada beberapa gunung, seperti Gunung Karacak (1. 838 m), Gunung Cikuray (2. 821 m), Gunung Guntur (2. 249 m), dan Gunung Papandayan (2. 622 m), yang membentuk Garut seperti mangkuk

dikelilingi oleh pegunungan. Akibatnya, saat hujan lebat terjadi, air akan langsung mengalir ke daerah sekitarnya. Kemiringan yang curam dan terjal meningkatkan kerawanan Kabupaten Garut terhadap bencana alam, khususnya banjir bandang (Buchari, 2020, p. 4).

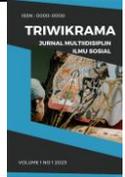
Dengan kondisi geografis yang ada dan tingginya intensitas hujan, Kabupaten Garut sangat rentan terhadap banjir. Hal ini terlihat dari kejadian banjir bandang yang terjadi pada tahun 2016. Setelah peristiwa tersebut, banjir bandang kembali melanda pada tahun 2022. Banjir bandang adalah kejadian banjir yang terjadi secara tiba-tiba dengan peningkatan debit yang cepat dan segera surut, membawa aliran yang besar dan cepat serta memiliki kemampuan erosi yang tinggi, sehingga menciptakan pemindahan material hasil erosi ke arah hilir. Faktor utama penyebab bencana ini adalah curah hujan yang sangat ekstrem (Poerwati, 2018, p. 2). Situasi banjir menjadi semakin parah akibat erosi dan penyusutan dasar sungai yang mengurangi kapasitas aliran sungai, gempa bumi serta tanah longsor yang mengubah jalur aliran sungai dan menciptakan halangan, sinkronisasi banjir antara sungai besar dan anak-anak sungainya, penguasaan lahan di daerah rawan banjir serta pertumbuhan kawasan perkotaan yang sangat pesat dan tidak terencana (Sedyowati, 2023, pp. 4-5). Pada tahun 2016, tujuh kecamatan di Kabupaten Garut terdampak oleh banjir bandang, yaitu Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Tarogong Kaler, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Banyuresmi, dan Kecamatan Karangpawitan. Kecamatan Tarogong Kidul mengalami dampak terparah dengan total korban dan kerugian yang paling signifikan, di mana 30 orang meninggal di Kecamatan Tarogong Kidul dari total 35 korban jiwa yang ada. Dalam hal permukiman, sebanyak 2. 529 rumah mengalami kerusakan berat dan ringan di seluruh kecamatan yang terdampak, sedangkan di Kecamatan Tarogong Kidul terdapat 1. 302 rumah yang mengalami kerusakan parah, sedang, dan ringan.

Tabel 1. Jumlah Korban Jiwa Kecamatan Tarogong Kidul

Desa	Nama	Usia (th)	Alamat
Haurpanggung	1 Oom	45	Kp. Kp Bijong Sudika RT 4 /19 Desa Haurpanggung
	2 Ahmad Solihin	35	Kp. Kp Bijong Sudika RT 4 /19 Desa Haurpanggung
	3 Fitriani	8	Kp. Kp Bijong Sudika RT 4 /19 Desa Haurpanggung
	4 Siti	28	Kp. Kp Bijong Sudika RT 4 /19 Desa Haurpanggung
	5 Jana	33	Kp. Kp Bijong Sudika RT 4 /19 Desa Haurpanggung
	6 Fika	4	Kp. Kp Bijong Sudika RT 4 /19 Desa Haurpanggung
	7 A. Taryana	50	Kp. Kp Bijong Sudika RT 4 /19 Desa Haurpanggung
Sukakarya	1 Wanda	7	Kp. Kikisik RW 12 Kel Sukakarya
	2 Diana	4	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	3 Lamsari	75	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	4 Iis Sariah	35	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	5 Irsad Dwi	8	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	6 Entin Kartini	62	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	7 H. Nawawi	65	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	8 Welis	35	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	9 Santi	65	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	10 Resal	1	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	11 Refina	7	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	12 Suryati	50	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	13 Nonoh	50	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	14 Neni	40	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	15 Euis	43	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	16 Dede Sumiati	50	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	17 Win Sukaningsih	55	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	18 Djikri	9	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	19 Novi Novianti	13	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
	20 Oom	75	Panti Werdha
	21 Nunung	80	Panti Werdha
	22 Yayah	55	Asrama Taruma Negara RT 01 RW 01 Kel Sukakarya
Jayawaras	1 Nani	65	Kp. Lewidaun 5 / RW 01 Kel Jayawaras
Jumlah	30 Orang		

Sumber : Kecamatan Tarogong Kidul

Dengan berbagai faktor yang menyebabkan banjir bandang di Garut tahun 2016, maka pemerintah melaksanakan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak bencana, terutama di Kecamatan Tarogong Kidul yang merupakan area paling terdampak. Mitigasi bencana adalah bagian dari siklus penanganan bencana yang meliputi persiapan, penanganan, pemulihan, dan rekonstruksi. Oleh karena itu, mitigasi bencana mencakup berbagai upaya yang



dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang timbul akibat bencana, baik dari segi fisik maupun dalam penyediaan tata ruang melalui edukasi yang berfokus pada aspek fisik dan mental (Subagia, 2015). Mitigasi struktural berkaitan dengan upaya pembangunan konstruksi fisik, sedangkan mitigasi non-struktural mencakup perencanaan penggunaan lahan dan adanya edukasi untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat berdampingan dengan bencana, terutama di area yang telah dibangun, sehingga warga dapat merasakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan mereka. (Bpbd, 2018).

Menurut Ayu Sekar Ningrum pemerintah bisa merencanakan untuk memindahkan penduduk dari lokasi yang rawan banjir ke tempat yang lebih aman dan layak untuk ditinggali. Selain itu, diperlukan penataan ruang yang berfokus pada tindakan pencegahan terhadap risiko banjir, terutama di sepanjang jalur sungai (Ningrum, 2020, p. 12). Ini berarti relokasi dan tata ruang di bantaran sungai memang perlu dilakukan sebagai upaya mencegah dampak banjir semakin buruk dan juga untuk kehidupan masyarakat yang lebih aman dan nyaman. Sholeh menyampaikan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima atau objek dalam pembangunan, melainkan sebagai partisipan aktif dalam upaya mitigasi tersebut, yang berarti masyarakat memiliki andil dalam program mitigasi bencana banjir bandang di Tarogong Kidul karena mereka yang mengetahui bagaimana kondisi di daerahnya sendiri dan mereka harus memahami apa yang perlu dilakukan jika banjir terjadi (Sholeh, 2022, p. 35). Baiq Harly Widayanti menerangkan bahwa seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, kebijaksanaan tradisional masyarakat Bentek mulai hilang, termasuk pemanfaatan kentongan atau kukul sebagai sarana komunikasi informasi mengenai bencana (Widayanti, 2021, p. 19). Artinya bahwa kemajuan teknologi dalam pemanfaatan untuk mitigasi bencana banjir bandang di Kecamatan Tarogong Kidul harus dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mitigasi banjir bandang di Kecamatan Tarogong Kidul sebagai wilayah paling terdampak pada saat banjir bandang tahun 2016. Juga untuk mengetahui implikasi dari mitigasi bencana banjir bandang yang sudah dilakukan di Kecamatan Tarogong Kidul melalui peristiwa banjir bandang Garut tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Teori sejarah memberikan panduan bagi sejarawan untuk mencapai hasil penulisan sejarah yang bisa menjadi pengetahuan yang disusun dengan cara yang teratur dan sistematis. Ida Bagus Sidemen menyebutkan lima elemen yang terdapat dalam teori sejarah, yaitu pemahaman sejarah, penjelasan mengenai peristiwa di masa lalu, objektivitas dalam kajian sejarah, hubungan sebab-akibat dalam sejarah, dan determinasi dalam konteks sejarah (Sidemen, 1991, pp. 30-38). Dalam kajian ini, akan diterapkan teori sejarah yang kedua, yaitu penjelasan sejarah. Penjelasan sejarah merupakan suatu upaya untuk membuat unit sejarah dapat dipahami dengan baik, yang menekankan pada hubungan sebab akibat dan mengabaikan penjelasan lainnya. Ini menunjukkan reduksi atau inti dari ilmu sejarah, yaitu menafsirkan dan memahami serta berkaitan dengan waktu yang meluas dan peristiwa tunggal (Kuntowijoyo, 2008, pp. 1-10). Kemudian terdapat teori manajemen bencana yang pada intinya manajemen bencana adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari bencana dengan cara mengurangi kemungkinan timbulnya bahaya serta menangani tingkat kerentanan (Purnama, 2017, p. 5). Manajemen bencana mencakup serangkaian aktivitas yang berlangsung terus-menerus di mana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bekerja sama untuk merumuskan langkah-langkah guna mengurangi efek bencana, melakukan respons yang cepat setelah bencana terjadi, serta melaksanakan usaha untuk proses pemulihan (Nisa, 2014, p. 108). Manajemen bencana terbagi empat tahapan atau bidang kerja yaitu fase pencegahan dan mitigasi, fase kesiapsiagaan, fase tanggap darurat dan fase pemulihan (Triutomo, 2011, p. 56). Manajemen bencana dalam

penelitian ini mencakup langkah-langkah mitigasi yang diterapkan oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam program mitigasi. Maka dari itu, penelitian ini tertuju pada program mitigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan kontribusi masyarakat dalam penanganan bencana, serta implikasi mitigasi bagi masyarakat tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka tentu diperlukan metode sejarah dalam penelitian ini. Metode sejarah adalah suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah. Metode sejarah adalah sekumpulan pedoman yang terstruktur dan mampu memberikan dukungan secara efisien dalam usaha mengumpulkan bahan atau sumber untuk penulis, dalam hal ini seorang sejarawan. Selain itu, dengan menerapkan metode sejarah diharapkan dapat melakukan penilaian secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesis yang diperoleh dalam bentuk sebuah narasi sejarah. (Herlina, 2008, p. 3). Pada metode sejarah terdapat beberapa tahap, yaitu tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Sjamsuddin, 2007, p. 13). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, ini mencakup dokumen, tulisan dan informasi yang didapat dari narasumber. Data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran terhadap sumber tertulis dan wawancara, di mana sumber utama dicatat dengan catatan tertulis juga bisa direkam dalam bentuk video/audio dan pengambilan foto untuk keperluan dokumentasi. Sementara itu, sumber data tambahan berasal dari tulisan yang dapat dibedakan menjadi buku dan jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi, serta dokumen resmi. (Rijali, 2018, p. 86).

HASIL & PEMBAHASAN

MITIGASI

Pada tahun 2017, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWS) melaksanakan pembangunan serta peninggian tanggul di Sungai Cimanuk. Tanggul merupakan salah satu jenis infrastruktur yang dirancang untuk mengendalikan aliran air sungai saat banjir terjadi. Umumnya tanggul dibangun dari material seperti tanah dan pasir dengan fungsi sebagai struktur hidrolis yang selalu terpapar oleh arus air. Tanggul memiliki peranan yang sangat vital karena di berbagai tempat, ketinggian permukaan air sungai saat banjir seringkali melebihi area sekitarnya. Tujuan utama dari adanya tanggul adalah untuk menghindari terjadinya banjir di sekitar sungai serta untuk mengatur arah aliran air sehingga tanggul tidak mengalami kerusakan akibat dampak banjir (Latifulloh, 2020, p. 6).



Gambar 1. Tanggul di Kecamatan Tarogong Kidul

Lalu ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (BPBD) yang juga pada tahun 2017 memasang alat pendeteksi debit air sungai, alat ini terpasang di Kampung Dirgahayu, RW 02, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Tarogong Kidul. Daris Hilman (48 tahun) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Garut menjelaskan bahwa pemasangan alat ini bertujuan untuk mengurangi resiko akibat bencana

melalui tanda atau sinyal yang dikeluarkan, oleh karena itu masyarakat akan mengetahui jika debit air sudah mulai naik. Alat ini disebut *Early Warning System* (EWS) dan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memberikan informasi awal tentang kemungkinan terjadinya bencana, sehingga masyarakat bisa mempersiapkan diri dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul. (Matondang, 2024).



Gambar 2. *Early Warning Sytem* (EWS) di Kecamatan Tarogong Kidul

Menurut Ketua Rw 02 Kp. Dirgahayu Kel. Sukakarya Kec. Tarogong Kidul yaitu Indra Rahmat (48 tahun), alat ini umumnya akan mengeluarkan bunyi melalui sirene ketika volume air mulai meningkat, lalu BPBD juga akan menginformasikan melalui grup *whatsapp* agar masyarakat tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan banjir sebab alat ini diawasi secara langsung oleh BPBD. Pemberitahuan tersebut berdasarkan pengamatan BPBD yang berasal dari cctv pada alat tersebut. Hal ini cukup berdampak sebab pada banjir bandang di tahun 2022 tidak ada korban jiwa, karena masyarakat sudah mendapatkan tanda peringatan tentang kemungkinan terjadinya banjir lewat alat tersebut.

Wawancara dengan Ferry Risnawann (52 tahun) yang menjabat sebagai Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Bidang P2KL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut menjelaskan bahwa pada bagian hulu sungai reboisasi atau penghijauan dilakukan, yang bertujuan untuk menahan air hujan agar tidak membawa material tanah ke aliran sungai, kegiatan ini rutin dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurut Azizah dan Kurniatain Reboisasi adalah salah satu cara untuk melestarikan hutan. Aktivitas reboisasi mencakup penanaman kembali wilayah hutan yang telah rusak dan merupakan tindakan untuk mencegah gundulnya area hutan. Hutan yang sudah gundul sering kali dianggap tidak bisa mendukung kehidupan makhluk hidup. Dengan melakukan reboisasi, hutan bisa terus dirawat dan bisa dimanfaatkan kembali oleh manusia. Selain itu, dengan reboisasi, hutan akan kembali dipenuhi pepohonan hijau dan menjadi lebih berkelanjutan (Azizah & Kurniatin, 2023, pp. 27-28).



Gambar 3. Reboisasi di hulu sungai Cimanuk

Atas data yang telah diperoleh tentang kerugian rumah yang dialami masyarakat, maka pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan relokasi kepada warga terdampak. Relokasi bisa dipahami sebagai proses penempatan ulang di lokasi baru dengan cara memindahkan dari lokasi sebelumnya ke lokasi yang berbeda, bertujuan untuk meningkatkan aspek keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat secara keseluruhan (Agung, 2001, p. 95). Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.868-BPKAD/2023 menjelaskan bahwa penyediaan lahan kosong dan bangunan beserta isian untuk warga terdampak adalah tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Garut. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 dalam pasal 26 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa Sungai Cimanuk yang berada di Kawasan Perkotaan Garut ditetapkan sempadan sungai paling sedikit 30-50 m dan/atau disesuaikan dengan kondisi fisik dan morfologi sungai. Ketentuan ini berdasarkan kondisi wilayah terdampak banjir bandang Sungai Cimanuk yang terjadi pada tanggal pada tahun 2016. Sesuai dengan Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.868-BPKAD/2023 pada lampirannya menyerahkan tanah dan bangunan kepada para korban bencana banjir bandang Garut tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Penerima Rumah Relokasi

No.	Rumah Relokasi	Jumlah Penerima
1.	Blok Ciseureuh	233
2	Blok Parabon	33
3	Blok Gadog	76
4	Blok Peer	31
5	Blok Lampegan	19
6	Blok Sayang Kaak	20
7	Kopilombong	42
8	Al-Kautsar (Gadog)	97
9	Huntap Babakan Carik	117

Sumber : Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.868-BPKAD/2023

Relokasi kepada warga terdampak dibagi pada sembilan titik permukiman, dengan 124 orang penerima berasal dari Kecamatan Tarogong Kidul dari total 668 orang penerima rumah relokasi. Sisanya adalah warga Kecamatan Tarogong Kaler, Garut Kota, Cisurupan, Bayongbong, Cikajang dan Karangpawitan.

Pada tingkat Desa/Kelurahan, forum bertujuan untuk menampung, mewakili, serta menyampaikan keinginan dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Ini sangat penting agar masyarakat dapat terlibat lebih luas dan menjaga keseimbangan partisipasi, sekaligus membantu penyebaran PRB di semua daerah Desa/Kelurahan. Dengan adanya forum ini, akan lebih terjamin partisipasi, integrasi, dan keberlanjutan dari Pengurangan Resiko bencana (PRB), termasuk pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Komunitas menuju Desa/Kelurahan yang memiliki daya tahan terhadap bencana yang berfokus pada masyarakat. (Eliyusman, 2022, p. 6) Pada tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Tarogong Kidul, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dikenal dengan sebutan Desa Tangguh Bencana (Destana), dan ini telah dilaksanakan di hampir semua Desa/Kelurahan di wilayah tersebut. Di akhir tahun 2023, Destana mulai diperkenalkan kepada Desa/Kelurahan yang juga mendapatkan dukungan dari BPBD selaku instansi yang mengerti dan memberikan informasi terkait bencana kepada masyarakat setempat. Selain bertugas saat terjadi bencana, BPBD juga berperan dalam memberikan pelatihan dan melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat serta lembaga lainnya. Tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, agar mereka lebih siap dan cepat tanggap saat menghadapi situasi darurat. Yanti Nurwanti (54 tahun) selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Garut menyebutkan bahwa terdapat 7 Desa/Kelurahan dari 12 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tarogong Kidul tercatat sudah mengikuti dan terdaftar pada program Destana. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Tarogong Kidul belajar banyak dari kejadian banjir bandang yang pernah melanda sebelumnya.

Tabel 3. Daftar Destana di Kecamatan Tarogong Kidul

No.	Desa/Kelurahan	Program Destana	Tahun Terbentuk
1.	Cibunar	Belum Terbentuk	-
2.	Haurpanggung	Sudah Terbentuk	2022
3.	Jayawaras	Belum Terbentuk	-
4.	Jayaraga	Belum Terbentuk	-
5.	Kersamenak	Belum Terbentuk	-
6.	Mekargalih	Sudah Terbentuk	2024
7.	Pataruman	Sudah Terbentuk	2021
8.	Sukabakti	Sudah Terbentuk	2024
9.	Sukagalih	Belum Terbentuk	-
10.	Sukajaya	Sudah Terbentuk	2023
11.	Sukakarya	Sudah Terbentuk	2023
12.	Tarogong	Sudah Terbentuk	2023

Sumber : BPBD Kabupaten Garut

Penjelasan dari Yogaswara Hilman Wiharja (57 tahun) sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Tarogong Kidul mengenai keterlibatan warga ditandai oleh mereka yang secara langsung membuat peta partisipatif untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berisiko terkena bencana. Daerah Tarogong Kidul terkenal dengan ancaman banjir bandang, sehingga banyak titik berisiko terletak di sepanjang sungai Cimanuk. Pembuatan peta partisipatif yang dilakukan oleh penduduk setempat merupakan cara untuk melibatkan masyarakat dalam program yang sedang dilaksanakan, karena warga sekitar memiliki pemahaman yang mendalam mengenai situasi di wilayah mereka, termasuk tempat-tempat yang berpotensi berbahaya dan jalur evakuasi yang harus diambil saat bencana terjadi. Berikut adalah peta partisipatif yang ada di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Tarogong Kidul dengan tanda warna merah muda pada peta menunjukkan bahwa area tersebut rawan dilanda banjir.



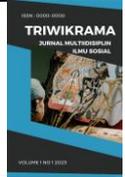
Gambar 4. Peta Partisipatif di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Tarogong Kidul

Wawancara dengan Toni Syahputra (43 Tahun) yang menjabat Kaur Perencanaan/Ketua FPRB Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul memberitahukan bahwa selain menghasilkan peta partisipatif, saat ini masyarakat juga dapat memahami keadaan di lapangan. Terdapat grup *WhatsApp* yang disebut "Sapa Warga", dengan beranggotakan pihak-pihak terkait seperti BPBD, Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta Warga yang diwakili oleh RT/RW untuk melakukan koordinasi atau menginformasikan jika ada indikasi terjadinya bencana banjir. Siapapun yang berada di lokasi ketika itu akan segera memberitahukan kepada grup *WhatsApp* "Sapa Warga" jika air Sungai Cimanuk mulai naik. Dengan cara ini, semua orang dapat memantau dan mempersiapkan diri menghadapi potensi banjir sehingga risiko bencana yang mungkin terjadi bisa diminimalisir.

IMPLIKASI

Mitigasi bencana pada umumnya bertujuan untuk mengurangi atau mencegah kerugian yang mungkin muncul akibat bencana dan dapat menyebabkan kehilangan jiwa atau merusak properti, yang pada akhirnya akan memengaruhi kehidupan serta aktivitas manusia (Wekke, 2022, p. 24). Menurut Daris Hilman ini terbukti ketika banjir bandang kembali menerjang Garut tahun 2022, di Kecamatan Tarogong Kidul khususnya dampak yang dirasakan tidak seperti banjir bandang tahun 2016. Debit air pun tidak terlalu tinggi karena daerah resapan sudah tersedia di hulu sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang Garut tahun 2022, warga yang terdampak adalah mereka yang belum mau untuk direlokasi dengan berbagai alasan. Ketua Rw 20 Kp. Mekar Asih Kel. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul yaitu Ajat Sudrajat (40 Tahun) menceritakan pada banjir bandang tahun 2022 air yang datang tidaklah terlalu besar, tanggul yang dibangun berfungsi sebagai penahan air agar tidak masuk ke permukiman warga. Selain itu dengan adanya relokasi warga yang sebelumnya berada di bantaran sungai membuat resiko warga terdampak menjadi lebih kecil. Salah seorang korban terdampak banjir bandang Garut tahun 2016 yang kemudian direlokasi yaitu Nandang Nurjaman (43 Tahun) memberitahukan bahwa memerlukan waktu bagi warga yang ikut relokasi untuk bisa beradaptasi di lingkungan baru, tapi tentunya ini lebih baik karena lebih aman dan nyaman tanpa takut kembali diterjang banjir

Keterlibatan masyarakat dalam langkah-langkah mitigasi adalah hal yang sangat penting, karena masyarakat adalah objek langsung terdampak ketika bencana terjadi. Dengan mengikutsertakan masyarakat setempat, diharapkan program-program yang dilaksanakan akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan memperkuat rasa kepemilikan setiap individu di masyarakat (Ritonga, 2024, p. 125). Menurut Yogaswara Hilman Wiharja Desa Tangguh



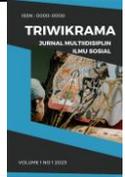
Bencana (Destana) Diharapkan dapat berfungsi sebagai pondasi utama dalam menghadapi risiko bencana di tingkat desa, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap bencana di Kabupaten Garut, khususnya di Kecamatan Tarogong Kidul yang sering mengalami banjir. Keberadaan Destana membantu desa-desa untuk melakukan sosialisasi mengenai risiko, mitigasi dan penanganan bencana dengan cara yang lebih terorganisir. Destana berperan krusial setelah terjadinya banjir bandang di Garut karena memperkuat pengelolaan bencana di tingkat desa, meningkatkan kemampuan dan kesiapan masyarakat, mendorong partisipasi warga secara aktif, mempercepat tindakan saat keadaan darurat, serta mendukung proses pemulihan pasca bencana. Lalu ada Daris Hilman yang menjelaskan pemasangan *Early Warning System* (EWS) Pasca terjadinya banjir bandang di Garut, dinilai berhasil dalam meningkatkan kewaspadaan dan meminimalkan kemungkinan timbulnya korban jiwa serta kerugian material akibat bencana serupa di masa depan. EWS memberikan kemampuan untuk mendeteksi sejak awal potensi terjadinya banjir bandang dengan memonitor curah hujan dan kondisi sungai secara langsung, yang memungkinkan masyarakat juga pemerintah untuk melakukan evakuasi serta langkah-langkah pencegahan lebih cepat sebelum bencana terjadi.

KESIMPULAN & SARAN

Upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah setelah banjir bandang pada tahun 2016 mencakup berbagai sektor. Dalam hal infrastruktur, pemerintah fokus pada pembangunan dan peninggian tanggul. Selain itu, dalam pemasangan alat pengukur banjir, pemerintah menggunakan *Early Warning System* (EWS) untuk mendeteksi tanda-tanda kemungkinan banjir. Di daerah hulu sungai, pemerintah melaksanakan reboisasi dan juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, pemerintah juga merelokasi penduduk yang tinggal di sepanjang bantaran sungai Cimanuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan. Rumah-rumah relokasi tersebut dibangun di beberapa lokasi yang tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lahan dan bangunan untuk tempat tinggal yang baru. Dalam upaya mengurangi risiko bencana, pemerintah mendirikan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa/Kelurahan yang ada di kecamatan Tarogong Kidul. Ini adalah bagian dari mitigasi sebelum terjadinya bencana atau mitigasi pra bencana, di mana masyarakat terlibat langsung dalam pembuatan peta partisipatif serta melakukan sosialisasi tentang kebencanaan.

Implikasi dari mitigasi bencana ini adalah pengurangan resiko dan dampak bencana serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Terbukti dengan berkurangnya jumlah kerugian dan tidak adanya korban jiwa pada saat banjir bandang tahun 2022, pada saat banjir bandang tahun 2022 warga yang dievakuasi adalah mereka yang belum mau untuk direlokasi. Masyarakat pun mengetahui apa yang harus mereka lakukan apabila banjir kembali terjadi.

Untuk peneliti berikutnya, diharapkan dapat meneliti isu mitigasi bencana yang lain di wilayah mereka masing-masing. Oleh karena itu, peneliti berikutnya diharapkan memperoleh lebih banyak referensi dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai topik tersebut. Harapan ini muncul karena kesalahan dan kekurangan yang telah dialami dapat menjadi pelajaran agar ke depannya bisa melakukan yang lebih baik. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut dan Masyarakat Kecamatan Tarogong Kidul terutama disarankan untuk terus bekerjasama dalam berbagai program mitigasi bencana, karena kesadaran serta kepedulian merupakan kunci keberhasilan program ini.



DAFTAR PUSTAKA

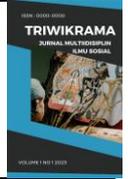
- Agung, Muhammad Ridlo. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan Semarang*. Semarang : Unisulla Press.
- Azizah, Nurul, Etin Kurniatin. 2023. *Mitigasi Bencana Banjir*. Surabaya : JePe Press Media Utama.
- Bpbd. 2018. Pengertian Mitigasi Bencana. <https://bpbd.karanganyarkab.go.id/?p=603>. Diakses pada 06 April 2023, pukul 12.28 Wita.
- Buchari, Ahmad. 2020. "Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia". *Sawala : Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial*. Volume 03, Nomor 01. Kendari : Universitas Sulawesi Tenggara, p.66.
- Eliyusman. 2022. *Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) Di Sumatra Barat*. Sleman : Deepublish.
- Harly, Widayanti Baiq. 2021. "Mitigasi Bencana Longsor dan Banjir Bandang Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara". *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*. Volume 02, Nomor 01. Purwokerto : Universitas Muhammadiyah Purwokerto, p.19.
- Herlina, Hina. 2008. *Metode Sejarah*. Bandung : Satya Historika.
- Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah : Historical Explanation*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Latifulloh, Harlan. 2020. "Kajian Kerusakan dan Penanggulangan Tanggul di Lokasi Kedung Bokor Sungai Citarum Hilir Kabupaten Bekasi", dalam Skripsi. Institut Teknologi Nasional. <http://eprints.itenas.ac.id/1026/>. Diakses pada tanggal 06 April 2023, pukul 08.50 Wita.
- Matondang, Hamida Hanum, Arif Ramadansyah. 2024. Apa Itu dan Bagaimana Cara Kerja Early Warning System (EWS). <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1760222-apa-itu-dan-bagaimana-kerja-early-warning-system-ews>. Diakses pada 27 Mei 2025, pukul 00.40 Wita.
- Nisa, Farichatun. 2014. "Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang". *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*. Volume 02, Nomor 02. Sidoarjo : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, p.108.
- Ningrum, Ayu Sekar. 2020. "Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa". *Geography Science Education Journal*. Volume 01, Nomor 01. Langsa : Universitas Samudra, p.12.
- Poerwati, Titik. 2018. "Strategi Mitigasi Bencana Banjir Bandang Berdasarkan Nilai Ketangguhan di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Volume 01, Nomor 01. Malang : Institut Teknologi Nasional Malang, p.2.
- Purnama, Sang Gede. 2011. *Modul Manajemen Bencana*. Denpasar : Universitas Udayana.
- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal UIN Antasari*. Volume 17, Nomor 33. Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari, p.86.
- Ritonga, Abraham. 2024. "Tinjauan Kebijakan yang Tangguh: Upaya Penanggulangan Bencana di Desa Ciwangi". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Volume 10, Nomor 1. Sumedang : Universitas Padjajaran, p.125.
- Sedyowati, Laksni. 2023. *Kota Bebas Banjir? Antara Harapan dan Kenyataan*. Malang : Selaras Media Kresindo..
- Sidemen, Ida Bagus. 1991. "Lima Masalah Pokok dalam Teori Sejarah". *Widya Pustaka* Edisi Tahun VIII Nomor 2. Denpasar : Fakultas Sastra Universitas Udayana, pp 30-31.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Soleh. 2022. "Mitigasi Bencana Banjir Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat di Wilayah Sungai Citarum Hulu". *Jurnal Aspirasi Unwir*. Volume 12, Nomor 1. Indramayu : Universitas Wiralodra, p.35.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 8, Number 12 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



- Subagia, I Wayan. 2015. “Pelatihan Mitigasi Bencana Alam Gempa Bumi pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Pengastulan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali”. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. Volume 4, Nomor 2. Buleleng : Universitas Pendidikan Ganesha, p.96.
- Triutomo, Sugeng. 2011. *Panduan Perencanaan Kontijensi Menghadapi Bencana*. Jakarta : BNPB.
- Wekke, Ismail Suardi. 2022. *Mitigasi Bencana*. Indramayu : Penerbit Adab.